

**KAJIAN TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN
UJUNG LERO KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG SULAWESI
SELATAN**

ALI FATHIR HASAN

L051171511



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**KAJIAN TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN
UJUNG LERO KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG SULAWESI
SELATAN**

SKRIPSI

ALI FATHIR HASAN

L051171511

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kajian Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Lero Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan

Nama : Ali Fathir Hasan

Stambuk : L051171511

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Draf skripsi Penelitian
disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Muhammad Kurnia S.Pi, M.Sc., Ph.D.
NIP. 197206171999031003

Pembimbing Anggota,



Ir. Ilham Jaya, MM.
NIP. 19591222 1991031 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan



Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan M.Si
NIP. 196601151995031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Fathir Hasan
NIM : L051171511
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa skripsi dengan Judul: "Kajian Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17, tahun 2007).

Makassar, 18 Juli 2024



Ali Fathir Hasan
Nim: L01171511

PERNYATAAN KEPEMILIKAN TULISAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Fathir Hasan
NIM : L051171511
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai pemilik tulisan (*author*) dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah seorang dari penulis berhak mempublikasinya pada jurnal ilmiah yang ditentukan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikutkan.

Makassar, 18 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan



Dr. Ir. Alfa F.P. Nelwan, M.Si
NIP. 19660115199503 1 002

Penulis



Ali Fathir Hasan
NIM. L051171511

ABSTRAK

Ali Fathir Hasan L01171511. “Kajian Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan”. Dibimbing oleh **Muhammad Kurnia** sebagai pembimbing utama dan **Ilham Jaya** sebagai pembimbing anggota.

Sebagai salah satu pelabuhan perikanan di Kabupaten Pinrang, PPI Ujung Lero diharapkan dapat berperan penting sebagai pusat pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Pinrang, termasuk dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas, secara khusus dalam peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan yang ada di sekitarnya, serta peningkatan pendapatan daerah, maka diperlukan suatu strategi tingkat pemanfaatan pelabuhan berdasarkan kondisi serta kebutuhan pengguna saat ini. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana PPI Ujung Lero memiliki fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang yang memerlukan evaluasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih baik dan maksimal, hal itu dimaksudkan agar pemanfaatan fasilitas dapat diketahui untuk pemanfaatan fungsi-fungsi PPI secara optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui kondisi fasilitas pokok, fungsional dan penunjang yang ada di PPI Ujung Lero. Menganalisis pemanfaatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang yang ada di PPI Ujung Lero.. Metode Penelitian ini adalah metode studi kasus dengan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Analisa data yang di gunakan menggunakan analisis *numeric*.

Hasil penelitian menunjukkan fasilitas pokok yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Ujung Lero yaitu dermaga, kolam pelabuhan, daratan pelabuhan, sedangkan untuk fasilitas fungsional yaitu tempat pelelangan ikan, pabrik es, *coolstorage*, tangki air bersih, kantor pengelola pangkalan pendaratan ikan.

Tingkat pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan lantora seperti dermaga 53,36 %, kolam pelabuhan 49,77 %, kedalaman perairan 77 %, daratan pelabuhan 7,3 %, dan pabrik es 0,06 %. Pada tingkat pemanfaatan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Lero masih tergolong sangat rendah seperti dermaga, gedung pelelangan, dan pabrik es, karena kurangnya nelayan yang membongkar hasil tangkapannya serta kurangnya kapal yang bersandar di dermaga PPI Ujung Lero.

Kata Kunci: PPI Ujung Lero, Fasilitas PPI Ujung Lero, Tingkat Pemanfaatan Fasilitas.

ABSTRACT

Ali Fathir Hasan L01171511. "Study of the Level of Utilization of Fish Landing Base Facilities (FLB) in Ujung Lero, Suppa District, Pinrang Regency, South Sulawesi". Supervised by **Muhammad Kurnia** as the main supervisor and **Ilham Jaya** as the member's supervisor.

As one of the fishing ports in Pinrang Regency, FLB Ujung Lero is expected to play an important role as a center for the development of capture fisheries in Pinrang Regency, including in providing quality fishery products, specifically in improving the living standards of the fishing communities around it, as well as increasing regional income. , a port utilization rate strategy is needed based on the current conditions and needs of users. In general, the condition of the facilities and infrastructure of the Ujung Lero PPI has basic facilities, functional facilities, and supporting facilities that require evaluation for better and maximum management and utilization, this is intended so that the utilization of the facilities can be known for optimal utilization of Fish Landing Base functions.

The purpose of this research is to know the condition of the main, functional and supporting facilities at FLB Ujung Lero. Analyzing the utilization of the main, functional and supporting facilities at FLB Ujung Lero. The research method is a case study method with data collected in the form of primary data and secondary data. Analysis of the data used using numerical analysis.

The results showed that the main facilities at the Ujung Lero Fish Landing Base were docks, harbor ponds, harbor land, while for functional facilities, namely fish auctions, ice factories, cool storage, clean water tanks, fish landing base management offices.

The level of utilization of the Lantora Fish Landing Base such as the pier is 53.36%, the port pool is 49.77%, the depth to the water is 77%, the port land is 7.3%, and the ice factory is 0.06%. At the level of utilization of the Ujung Lero Fish Landing Base (FLB) facilities, it is still very low, such as the wharf, auction building, and ice factory, due to the lack of fishermen unloading their catches and the lack of ships docking at the Ujung Lero FLB pier.

Keywords: Ujung Lero FLB, Ujung Lero FLB Facilities, Facility Utilization Rate.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis dengan tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan September 2022 ini ialah pelabuhan perikanan, dengan judul “Kajian Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan”. Dengan kerendahan hati dan segala hormat penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dengan mendukung dan membimbing Penulis, khususnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Kedua **Orang tua** tercinta, **Kakek dan Nenek, Om dan Tante** Saya serta seluruh keluarga yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak **Muhammad Kurnia S.Pi, M.Sc., Ph.D** selaku pembimbing utama dan Bapak **Ir Ilham Jaya. M.M** selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan petunjuk dari awal penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak **Prof.Dr. Metusalach, M.Sc** dan bapak **Safruddin, S.Pi., MP., Ph.D** selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu, masukan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Ir. Siti Aslamyah, MP** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan
6. Bapak **Dr. Ir. Alfa F.P. Nelwan. M.Si** selaku Ketua Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
7. **Seluruh Dosen Pengajar** dan **Staf** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin yang bekerja keras dalam memberikan ilmu dan membantu menyelesaikan segala bentuk persuratan berkas-berkas penulis butuhkan.
8. Teman – teman seperjuangan mahasiswa S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan angkatan 2017, kerabat, keluarga, dan semua pihak yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi nilai untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta segala amal baik serta jasa dari pihak yang membantu Penulis mendapat berkat dan karunia Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 18 Juli 2024

Ali Fathir Hasan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Pelabuhan Perikanan	4
B. Pangkalan Pendaratan Ikan	7
C. Peran dan Fungsi Pelabuhan	9
D. Operasi Pelabuhan Perikanan.....	10
E. Fasilitas Pelabuhan Perikanan	11
F. Pengembangan Pelabuhan Perikanan	14
G. Kajian Penelitian terdahulu	16
III. METODE PENELITIAN	18
A. Waktu Dan Tempat.....	18
B. Alat Dan Bahan.....	18
C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data	19
D. Prosedur Penelitian dan Rencana Penelitian.....	20
E. Analisis Data	20
IV. Hasil Penelitian	25
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	25
B. Potensi Sumberdaya Perikanan	26
C. Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Ujung Lero.....	27
D. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas PPI Ujung Lero.....	36
E. Kesesuaian PPI menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012	37

V. PEMBAHASAN	39
A. Keadaan Umum PPI Ujung Lero	39
B. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Lantora	40
C. Kesesuaian PPI menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012	43
VI. SIMPULAN DAN SARAN	44
A. Simpulan	44
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Alat dan Bahan.	18
2. Pengguna dan Penggunaan Air Bersih Pelabuhan	22
3. Penilaian Tingkat Pemanfaatan.	24
4. Fasilitas Pokok PPI Ujung Lero.....	27
5. Fasilitas Fungsional Ujung Lero.	29
6. Fasilitas Penunjang PPI Ujung Lero.....	32
7. Kriteria PPI Ujung Lero sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012	39
8. Ketersediaan Fasilitas yang ada di PPI Ujung Lero.....	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Peta Lokasi Penelitian.....	18
2. Layout PPI Ujung Lero.....	25
3. Diagram Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Pinrang 2016 – 2020.....	26
4. Dermaga PPI Ujung Lero.	27
5. Kolam Pelabuhan PPI ujung Lero	28
6. Daratan Pelabuhan PPI Ujung Lero.....	29
7. Pabrik Es Ujung Lero.....	30
8. Gedung Pelelangan PPI Ujung Lero	30
9. Tangki Air Bersi.....	31
10. Kantor Administrasi PPI Ujung Lero.....	31
11. <i>Cold Storage</i> Ujung Lero	32
12. Kios Nelayan PPI Ujung Lero.....	33
13. Toilet Umum PPI Ujung Lero.....	33
14. Mushollah PPI Ujung Lero.....	34
15. Pos Jaga PPI Ujung Lero	34
16. Kantin Nelayan PPI Ujung Lero.....	35
17. Kedai Nelayan Ujung Lero.....	35
18. Balai Nelayan Ujung Lero	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Dermaga PPI Ujung Lero.	49
2. Analisis perhitungan tingkat pemanfaatan kolam Pelabuhan.....	50
3. Analisis perhitungan tingkat pemanfaatan kedalaman perairan.....	51
4. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Daratan Pelabuhan.	51
5. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Pabrik Es.	52
6. Dokumentasi Penelitian	52
7. Fasilitas-fasilitas yang ada di PPI Ujung Lero.....	54

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.502 pulau, dan garis pantai sepanjang 81.000 km dengan Luas wilayah perikanan di laut sekitar 5,8 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta km² serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km². Berdasarkan hasil pengkajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), potensi sumberdaya ikan laut Indonesia tersebut diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun, yang terdiri dari perairan wilayah laut teritorial sekitar 4,625 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,785 juta ton per tahun. Berkaitan dengan itu, prospek pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan Indonesia menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis dinilai sangat cerah terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, penyediaan lapangan kerja, Penerimaan devisa melalui ekspor dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (Hutabarat, 2010).

Kabupaten Pinrang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah Kabupaten Pinrang sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi serta laut yang melintang sepanjang pinggir Kabupaten yang merupakan bagian dari pantai barat Sulawesi Selatan. Potensi perikanan laut Kabupaten Pinrang terbesar yaitu pada tahun 2014 dengan produksi 12.823,03 Ton. Maka diperlukan Pelabuhan Perikanan yang memadai agar hasil tangkapan nelayan dapat di distribusikan di PPI setempat guna meningkatkan data hasil produksi perikanan laut Kabupaten Pinrang sehingga nelayan tidak lagi mendaratkan hasil tangkapan mereka diluar wilayah Kabupaten Pinrang seperti yang sering terjadi di PPI Cempae Kota Parepare.

Untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan suatu pelabuhan perikanan adalah dengan cara mengamati fasilitas-fasilitas yang terdapat pada pelabuhan perikanan, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang, dan bagaimana fasilitas-fasilitas tersebut dimanfaatkan lebih optimal dan cara pengelolaannya,serta program yang dilaksanakan kedepannya, dan seberapa jauh tingkat pemanfaatan fasilitas-fasilitas tersebut (Yahya dan Suherman, 2013).

Untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan tersebut salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah pembangunan sarana dan prasarana perikanan. Khusus untuk perikanan tangkap sarana dan prasarana yang dimaksud adalah "Pelabuhan Perikanan" yang berfungsi sebagai sarana penunjang peningkatan produksi. Mengingat betapa pentingnya pembangunan pelabuhan perikanan maka di dalam

Undang-Undang Perikanan dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban membangunnya, dan telah direalisasikan di berbagai tempat di Indonesia.

Pelabuhan Perikanan memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. Pelabuhan Perikanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan (Kusyanto, *et all.*, 2006).

Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan pelabuhan dilakukan secara efektif, efisien, dan profesional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat. Transportasi laut sangat berperan dalam distribusi barang dan jasa khususnya pulau-pulau bagian Timur Indonesia. Untuk menunjang peran tersebut dibutuhkan dukungan infrastruktur pelabuhan dengan fasilitas yang mencukupi

Keberhasilan pengembangan sektor perikanan tidak terlepas dari dukungan prasarana pendukungnya dimana dalam hal ini adalah pelabuhan perikanan merupakan interface (penghubung) antara aktivitas perikanan di laut (penangkapan) dengan aktivitas perikanan di darat (pengolahan dan pemasaran), dan disamping itu pelabuhan perikanan merupakan tempat penyediaan bahan perbekalan, perbengkelan, pengolahan hasil tangkapan dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa keberhasilan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain Pelabuhan Perikanan dapat memajukan ekonomi disuatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah (Yuspardianto, 2006).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Lero merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang ada di Kabupaten Pinrang. PPI Ujung Lero difungsikan sebagai pelabuhan bongkar muat hasil-hasil perikanan. Selain itu, nelayan juga memanfaatkan PPI Ujung Lero sebagai tempat untuk menjual ikan hasil tangkapan. Saat ini, PPI Ujung Lero telah dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan aktivitas di PPI tersebut.

Sebagai salah satu pelabuhan perikanan di Kabupaten Pinrang, PPI Ujung Lero diharapkan dapat berperan penting sebagai pusat pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Pinrang, termasuk dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas,

secara khusus dalam peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan yang ada di sekitarnya, serta peningkatan pendapatan daerah, maka diperlukan suatu strategi tingkat pemanfaatan pelabuhan berdasarkan kondisi serta kebutuhan pengguna saat ini. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana PPI Ujung Lero memiliki fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang yang memerlukan evaluasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih baik dan maksimal, hal itu dimaksudkan agar pemanfaatan fasilitas dapat diketahui untuk pemanfaatan fungsi-fungsi PPI secara optimal.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan fungsi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang yang ada di PPI Ujung Lero?
2. Bagaimana pemanfaatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang yang ada di PPI Ujung Lero?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui kondisi fasilitas pokok, fungsional dan penunjang yang ada di PPI Ujung Lero.
- b. Menganalisis pemanfaatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang yang ada di PPI Ujung Lero.

D. Manfaat Penelitian

Tersedianya data dan informasi tentang tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan (fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang) dan rencana pengembangan bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan khususnya pengembangan kineja Pangkalan Pendaratan Ikan Ujung Lero. Selain itu sebagai informasi ilmiah tentang pelabuhan perikanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan dalam bahasa mempunyai dua pengertian yaitu *harbour* dan *port*. *Harbour* adalah suatu tempat dipinggir laut yang dapat digunakan untuk berlabuh dengan aman bagi kapal-kapal, karena kapal-kapal terlindung dari angin laut. *Port* adalah suatu tempat untuk membongkar dan memuat barang atau penumpang dari kapal-kapal yang datang dan dikenal sebagai kegiatan maritim dan di kelolah oleh otoritas pemerintah. Sedangkan pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasaran (Murdianto, 2004).

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang digunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan (Lubis, 2012).

Secara teknis pelabuhan perikanan adalah salah satu bagian ilmu bangunan maritim, dimana dimungkinkan kapal-kapal berlabuh atau bersandar kemudian dilakukan bongkar muat (Kramadibrata, 2002). Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari pengolahan dan pemasaran, baik berskala lokal, nasional maupun berskala internasional. Menurut Kementrian Kealautan dan Perikanan (1991) dalam Kurniawan (2001) bahwa aspek-aspek tersebut secara terperinci adalah:

1. Produksi: bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan.
2. Perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya.
3. Pengolahan: bahwa pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapannya.
4. Pemasaran: bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan dan pemasaran hasil tangkapannya.

Berdasarkan Kep No. 31 Tahun 2012 tentang Pelabuhan perikanan, maka pelabuhan perikanan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN/Tipe A)
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN/Tipe B)
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP/Tipe C)
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI/Tipe D).

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Keputusan Nomor Kep.8/MEN/2012 tentang pelabuhan perikanan membagi pelabuhan perikanan menjadi (pasal 6) :

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

Pelabuhan Perikanan Samudera merupakan pelabuhan perikanan tipe A, yang skal layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan wilayah perairan internasional.

- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).

Pelabuhan Perikanan Nusantara masuk kategori tipe B, yang skal layanan nya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

Pelabuhan Perikanan Pantai masuk kategori tipe C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah pantai dan laut teritorial, dan bisa sampai ke wilayah laut ZEEI.

- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pangkalan Pendaratan Ikan masuk kategori tipe D, yang skala layanannya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan pantai dan perairan teritorial.

Menurut Murdiyanto (2004), klasifikasi besar-kecil usahanya pelabuhan perikanan dibedakan menjadi 4 tipe pelabuhan, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan Tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan perairan internasional, mempunyai perlengkapan untuk menangani (handling) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 200 ton/hari atau 73.000 ton/tahun baik untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri (ekspor). Pelabuhan perikanan tipe A kapal ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar daripada 60 GT (gross tonage) sebanyak sampai dengan 100 unit kapal sekaligus. Mempunyai

cadangan lahan untuk pengembangan seluas 30 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

2. Pelabuhan Perikanan tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), mempunyai perlengkapan untuk menangani (handling) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton/hari atau 18.250 ton/tahun baik untuk 9 pemasaran di dalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe B ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar dari pada 60 GT sebanyak sampai dengan 50 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 10 Ha. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

3. Pelabuhan Perikanan Tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal-kapal nelayan yang berukuran 15 GT sebanyak 25 unit sekaligus, dengan produksi ikan sebanyak 20 ton/hari dan mempunyai perlengkapan untuk mengolah hasil tangkapan. Untuk pembangunan PPP di rencanakan cadangan lahan pengembangan seluas 5 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dimaksudkan sebagai sarana dan prasarana pendaratan ikan yang dapat menangani produksi ikan sampai dengan 5 ton/hari, dapat menampung kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT sejumlah 15 unit sekaligus. Untuk pembangunan PPI ini diberikan lahan darat untuk pengembangan seluas 1 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

Pengklasifikasian pelabuhan perikanan pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai parameter (Lubis, 2012), antara lain:

- a. Luas lahan, letak, dan jenis konstruksi bangunanya
- b. Tipe dan ukuran kapal-kapal yang masuk pelabuhan.
- c. jenis perikanan dan skala usahanya.
- d. Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan.

Pelabuhan perikanan menurut letak dan tipe konstruksi bangunan, dibagi menjadi (Lubis, 2012), antara lain:

- a. Pelabuhan perikanan alam
- b. Pelabuhan perikanan buatan

c. Pelabuhan perikanan semalam.

B. Pangkalan Pendaratan Ikan

Pangkalan Pendaratan Ikan yang merupakan pelabuhan perikanan pantai memiliki kriteria sebagai berikut;

1. Melayani kapal perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang- kurang 10 GT.
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 2 m.
4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.
5. Memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 2 Ha.

Sepertinya halnya pelabuhan secara umum, maka pelabuhan perikanan juga dapat diklasifikasikan yaitu menurut letak dan jenis usaha perikananannya. Menurut Lubis (2002), pelabuhan perikanan bisa dilihat dari banyaknya faktor yang ada, pengklasifikasiannya dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter, antara lain;

- a. Luas lahan, letak dan jenis konstruksi bangunannya.
- b. Tipe dan ukuran kapal-kapal yang masuk pelabuhan.
- c. Jenis perikanan dan skala usaha.
- d. Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan.

Pelabuhan Perikanan menurut tipe konstruksi bangunan, dibedakan menjadi:

- a. Pelabuhan alam, adalah suatu daerah yang menjorok ke dalam, terlindung oleh suatu pulau, jazirah atau terletak di suatu teluk sehingga kapal dapat bernavigasi dan berlabuh.
- b. Pelabuhan buatan, adalah suatu daerah perairan hasil bentukan manusia agar terlindung dari ombak/badai/ arus, sehingga memungkinkan kapal untuk merapat.
- c. Pelabuhan semi alam, adalah pelabuhan yang sifatnya juga pelabuhan alam atau pelabuhan buatan.

Pelabuhan Perikanan berdasarkan jenis dan skala usaha perikananannya, dibedakan menjadi;

- a. Pelabuhan perikanan berskala besar atau pelabuhan perikanan laut dalam, yaitu pelabuhan untuk perikanan industri atau untuk berlabuh/bersandarnya kapal-kapal penangkapan berukuran besar dengan ukuran panjang antara 40 sampai 120 meter, berat > 50 GT. Mempunyai kolam pelabuhan yang dalam dan dermaga yang panjang. Di pelabuhan ini terdapat juga perusahaan- perusahaan pengolahan dan perdagangan-perdagangan besar. Hasil tangkapan yang didaratkan didistribusikan

untuk tujuan nasional maupun internasional.

- b. Pelabuhan perikanan berskala menengah, yaitu pelabuhan untuk perikanan semi industri, dan merupakan tempat berlabuh dan bertambatnya kapal-kapal penangkapan ikan berukuran antara 15 sampai 50 GT. Di pelabuhan ini terkadang terdapat juga perusahaan-perusahaan pengolahan, sementara hasil tangkapannya bertujuan untuk konsumsi nasional dan sedikit untuk konsumsi lokal.
- c. Pelabuhan perikanan berskala kecil atau pelabuhan pantai, yaitu pelabuhan untuk perikanan kecil atau perikanan tradisional atau tempat berlabuh dan bertambatnya kapal-kapal penangkapan berukuran < 15 GT. Pelabuhan ini mempunyai kolam pelabuhan yang tidak terlalu dalam. Umumnya hasil tangkapan yang didaratkan adalah dalam bentuk segar atau dipertahankan kesegarannya dengan menambahkan es. Hasil tangkapan ditujukan terutama untuk pemasaran lokal.

Pelabuhan perikanan berdasarkan daerah operasi penangkapan, dibedakan menjadi:

- a. Pelabuhan perikanan laut lepas, yaitu pelabuhan tempat berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan di laut lepas atau di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- b. Pelabuhan perikanan lepas pantai, yaitu pelabuhan tempat berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan di perairan lepas pantai atau di perairan nusantara.
- c. Pelabuhan perikanan pantai, yaitu pelabuhan tempat berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan di perairan pantai.

Pelabuhan perikanan berdasarkan asal dan tujuan hasil tangkapan, dibedakan menjadi:

- a. Pelabuhan laut, yaitu pelabuhan yang terbuka untuk jenis perdagangan dalam dan luar negeri.
- b. Pelabuhan pantai, yaitu pelabuhan yang terbuka untuk jenis perdagangan dalam negeri.
- c. Pelabuhan sungai, yaitu pelabuhan yang cenderung untuk perdagangan antar daerah yang dihubungkan oleh sungai.

Pengklasifikasian pelabuhan perikanan seperti tersebut di atas pada dasarnya untuk mempermudah pengelolaan khususnya dan pengembangan pelabuhan pada umumnya.

Pangkalan Pendaratan Ikan Ujung Lero yang terletak di Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan dan pertumbuhan ekonomi nelayan.

- b. Tempat berlabuhnya kapal-kapal perikanan dan kegiatan-kegiatannya.
- c. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan para nelayan.
- d. Pusat penanganan dan pengelolaan hasil perikanan.
- e. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan.
- f. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan.
- g. Pusat penyuluhan dan pengumpulan data pusat pengawasan penangkapan ikan dan pengendalian sumberdaya ikan.

C. Peran dan Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum (*general function*). Beberapa fungsi umum merupakan tugas pokok melindungi kapal dan pelayaran lainnya yang hanya dapat dilakukan di setiap pelabuhan perikanan yang bukan untuk kegiatan perikanan. Fungsi khusus merupakan tugas pelayaran di pelabuhan perikanan membedakan pelabuhan perikanan dari pelabuhan lain yang bukan pelabuhan perikanan. Fungsi khusus ini terutama yang diturunkan dari karakteristik komoditas perikanan yang sifatnya mudah busuk (*highly perishable*). Sifat mudah busuk ini menghendaki pelayanan khusus berupa perlakuan penanganan, pendistribusian hasil ikan secara cepat ataupun pengolahan (*fish processing*). Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan darat dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi (Murdiyanto, 2004).

Menurut Lubis (2012), Pelabuhan perikanan memiliki fungsi dan peranan terhadap perikanan laut, karena pelabuhan perikanan merupakan pusat perekonomian, mulai ketika ikan selesai ditangkap dari *fishing ground*-nya sampai ikan dipasarkan lebih lanjut. Hal tersebut mendorong keberadaan industri perikanan di pelabuhan perikanan, tidak hanya berskala lokal tetapi juga regional dan internasional. Fungsi utama pelabuhan perikanan berkaitan dengan pelayanan jasa-jasa bagi:

- a. Kapal-kapal yang telah selesai menangkap ikan dari daerah penangkapan antara lain adanya fasilitas pendaratan ikan yang aman dan pemeliharaan kapal.
- b. Hasil tangkapan yang telah didaratkan di pelabuhan perikanan antara lain adanya kegiatan pembongkaran, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan.
- c. Pengembangan industri perikanan yang berada dilingkungan pelabuhan perikanan.

Menurut Murdiyanto (2004), pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha yang berdaya guna tinggi. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per. 16/Men/2006, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang

berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

Berdasarkan pasal 41 ayat 1 UU No.45/2009 tentang Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan berfungsi sebagai:

- a. Tempat tambat labuh kapal perikanan.
- b. Tempat pendaratan ikan.
- c. Tempat pemasaran dan distribusi ikan.
- d. Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
- e. Tempat pengumpulan data tangkapan
- f. Tempat penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan
- g. Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Selanjutnya menurut Kusyanto (2005), untuk menjamin harga ikan dapat menguntungkan nelayan kewajiban Pemerintah membantu nelayan dalam memasarkan ikan melalui sistem lelang. Maksud dari sistem lelang adalah membantu nelayan menjual ikan untuk mendapatkan harga yang optimal pada suatu tempat tertentu kepada sejumlah pembeli melalui cara lelang. Dilain pihak fungsi pembinaan mutu dan pengolahan dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah produk perikanan sehingga akan menimbulkan dampak ganda baik terhadap pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja.

Menurut Lubis (2012), peran pelabuhan perikanan yang dapat memberikan jasa-jasanya meliputi:

- a. Penanganan untuk mempertahankan mutu dan memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan yang didaratkan.
- b. Mampu melakukan pembongkaran ikan secara cepat dan penyeleksian secara cermat.
- c. Mampu memasarkan ikan yang menguntungkan baik bagi nelayan maupun pedagang melalui aktivitas pelelangan.
- d. Mampu melakukan pendataan produksi hasil tangkapan yang didaratkan melalui sistem pendataan yang benar.

D. Operasional Pelabuhan Perikanan

Pengertian tentang operasional pelabuhan perikanan adalah tindakan atau gerakan sebagai pelaksana rencana yang telah dikembangkan untuk memanfaatkan fasilitas pada pelabuhan perikanan agar berdaya guna secara optimal bagi "fasilitas itu sendiri" atau fasilitas lainnya yang terkait" (Murdiyanto, 2004). Kegiatan operasional yang berlangsung di pelabuhan perikanan (Ngamel, 2005) adalah:

a. Pendaratan Ikan

Pendaratan ikan di pelabuhan perikanan sebagian besar berasal dari kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan itu, hanya kepelabuhan itu dengan menggunakan sarana transportasi darat.

b. Penanganan, Pengolahan dan Pemasaran ikan

Sesuai dengan salah satu fungsinya sebagai tempat pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, penanganan ikan segar dilakukan dengan metode pendinginan yang dapat dilakukan dengan es. Pengolahan ikan yang dimaksudkan untuk mempertahankan mutu sehingga waktu pemasaran menjadi lebih lama serta dapat meningkatkan nilai jual ikan, kegiatan pemasaran yang dilakukan di pelabuhan bersifat lokal, nasional, maupun ekspor.

c. Penyaluran Perbekalan

Penjualan/pengisian perbekalan yang berkaitan dengan fasilitas pelabuhan saat ini adalah penjualan es, air bersih, penyaluran BBM dan suku cadang. Pelayanan perbekalan ini umumnya diadakan oleh pihak UPT pelabuhan, KUD, koperasi pegawai pelabuhan, BUMN dan pihak swasta.

Keberhasilan suatu kegiatan operasional pelabuhan perikanan tergantung pada kelancaran aktivitasnya mulai dari proses pendaratan hasil tangkapan, pelelangan, pengolahan hingga pemasaran hasil tangkapan (Afandy, 1998).

E. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Fasilitas pelabuhan perikanan meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan. Luas dan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh suatu pelabuhan perikanan sangat tergantung kepada areal yang tersedia.

➤ Fasilitas Pokok.

Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar yang wajib dimiliki pelabuhan guna untuk melayani kegiatan pendaratan ikan seperti pembongkaran hasil tangkapan dan pemuatan perbekalan untuk keperluan operasi penangkapan ikan. Fasilitas pokok juga berfungsi melindungi kegiatan di pelabuhan dari gangguan alam seperti ombak, arus dan pendangkalan kolam pelabuhan akibat sedimentasi. Fasilitas pokok antara lain: dermaga, penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur masuk keluar kapal.

a. Dermaga

Dermaga adalah bangunan yang biasa digunakan untuk bersandar kapal di suatu pelabuhan. Dermaga dalam kegiatan perikanan digunakan untuk membongkar hasil tangkapan, berlabuh dan mengisi perbekalan. Ditinjau dari posisinya dermaga dapat digolongkan ke dalam dua tipe, yaitu : 1) *Wharf* atau *Quay*, yaitu bentuk dermaga yang

letaknya dekat atau sejajar dengan garis pantai, 2) *Pier* atau *Jetty*, yaitu dermaga yang bentuknya menjorok ke laut yang dapat berbentuk lurus, huruf T atau huruf L.

b. Kolam Pelabuhan dan Alur Pelayaran

Kolam pelabuhan adalah bagian perairan yang menampung kegiatan kapal perikanan antara lain : berlabuh, bongkar muat, mengisi perbekalan dan memutar kapal. Dalam pembuatan kolam pelabuhan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- memiliki luas yang dapat menampung seluruh kapal yang berlabuh dan masih memberikan ruang yang leluasa untuk bergerak bagi kapal,
- lebarnya harus dapat dipergunakan bagi kapal yang berputar dengan bebas dalam gerak melingkar yang tidak terputus,
- perairannya cukup dalam sehingga kapal terbesar masih mampu untuk berlabuh di saat air sedang surut,
- tempatnya cukup terlindung dari angin, gelombang dan arus yang berbahaya.

Daerah memutar kapal (*turning basin*) di dalam kolam pelabuhan dapat mempunyai berbagai bentuk tergantung pada ukuran pelabuhan dan jumlah kapal yang akan berlabuh. Radius "*turning circle*" yang ideal adalah dua kali panjang kapal terbesar dan ukuran minimum radius adalah sama dengan panjang kapal terbesar. Untuk tetap amannya kapal melakukan pelayaran di dalam kolam pelabuhan maka kedalaman perairan harus cukup dalam untuk kapal terbesar dalam muatan penuh. Kedalaman perairan kolam pelabuhan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain : (1) draft kapal terbesar dengan muatan penuh yang menggunakan pelabuhan tersebut; (2) tinggi gelombang maksimum di dalam kolam pelabuhan ($H = 70$ cm); (3). Tinggi ayunan kapal yang berlayar (maksimum 30 cm); (4) "*Clearance*" sebagai pengaman antar lunas kapal (*keel*) dan dasar perairan. Nilai C berkisar 25 cm – 100 cm tergantung lunak atau kerasnya dasar perairan. Pada lokasi pendirian pelabuhan di mana kedalaman perairan tidak mencukupi, maka perlu dilakukan pengerukan.

Alur pelayaran, atau tempat masuk dan keluarnya kapal-kapal perikanan juga sangat penting keberadaannya. Alur pelayaran harus cukup lebar supaya kapal dapat berpapasan dengan aman, tetapi tidak boleh terlalu lebar karena akan mengakibatkan pengaruh gelombang ke dalam kolam pelabuhan akan menjadi besar.

c. Daratan pelabuhan.

Daratan pelabuhan adalah bagian darat yang menampung seluruh fasilitas pelabuhan, yang biasanya bagian darat ini dibatasi oleh air dan pagar pelabuhan. Luas daratan pelabuhan harus 2 – 4 kali luas seluruh fasilitas bilamana semuanya dibangun di atasnya.

Daratan pelabuhan harus berada pada ketinggian tertentu supaya tidak terendam air pada saat pasang tertinggi atau kena sapuan gelombang pada musim ombak.

Ketinggian pelabuhan juga berhubungan dengan sistim drainage pelabuhan. Tinggi daratan pelabuhan sekurang-kurangnya 50 cm di atas pasang tertinggi, sedangkan dermaga dan pinggiran lainnya 50 – 70 cm di atas pasang air laut tertinggi tergantung pada tinggi gelombang di kolam pelabuhan tersebut.

d. Pemecah gelombang

Pada daerah di mana gelombang lautnya sangat tinggi maka sangat diperlukan untuk membangun pemecah gelombang (*break water*) yang fungsinya untuk melindungi kegiatan yang berlangsung di kolam pelabuhan. *Break water* sekaligus dapat membentuk kolam pelabuhan. Pemecah gelombang juga dapat berfungsi sebagai penahan sedimen dari sekitar pelabuhan.

➤ **Fasilitas Fungsional**

Fasilitas fungsional yang dikatakan juga suprastruktur adalah fasilitas yang berfungsi untuk meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok sehingga dapat menunjang aktivitas pelabuhan perikanan. Fasilitas-fasilitas fungsional ini dikelompokkan antara lain untuk:

a. Penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya, yaitu :

- Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- Fasilitas pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan, seperti tempat penjemuran ikan dan gedung pengolahan;
- Pabrik es dan gudang es;
- Refrigerasi/fasilitas pendingin, seperti *cool room* dan *cold storage*; dan
- Gedung-gedung pemasaran.

b. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan armada dan alat penangkapan ikan, yaitu:

- Lapangan perbaikan alat penangkapan ikan;
- Ruangan mesin;
- Tempat penjemuran alat penangkapan ikan;
- Bengkel : fasilitas untuk memperbaiki mesin kapal;
- *Slipways* : tempat untuk memperbaiki bagian lunas kapal;
- Gudang jaring : tempat untuk penyimpanan jaring; dan
- *Vessel lift* : fasilitas untuk mengangkat kapal dari kolam pelabuhan ke lapangan perbaikan kapal.

c. Fasilitas perbekalan : tangki dan instalasi air minum, tangki bahan bakar.

d. Fasilitas komunikasi : stasiun jaringan telepon, radio SSB

➤ **Fasilitas Penunjang**

Fasilitas tambahan yaitu fasilitas yang secara tidak langsung dapat menaikkan peranan pelabuhan namun tidak dimasukkan ke dalam fasilitas fungsional. Fasilitas

tambahan dapat berupa penginapan nelayan, mess operator, tempat perbaikan alat tangkap, perkantoran pengusaha perikanan, kantin, poliklinik dan tempat beribadah. Pelabuhan perikanan memiliki fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas luar (*contour facilities*) antara lain : pemecah gelombang, penahan pasir (*sand groins*), dinding penopang (*retaining walls*), pintu masuk (*sluices*), tempat tambat (*locks*), dermaga (*levees*), *jetties*, tanggul (*seashore levees*), dan pembatas/dinding (*parapets*).
2. Fasilitas berlabuh (*mooring facilities*) antara lain: tempat tambat dermaga (*mooring quay*), tempat pendaratan, pelampung tambat (*mooring buoy*), dermaga apung (*floating piers*), tonggak tambatan (*bollards*), dan *slipways*.
3. Fasilitas di air (*water facilities*) antara lain: jalan keluar, tempat berlabuh, dan kolam Pelabuhan.
4. Fasilitas perhubungan (*transporting facilities*) antara lain: jalan, jembatan, navigasi, dan sebagainya.
5. Fasilitas darat (*land for fishing port facilities*) antara lain:
 - fasilitas pemeliharaan kapal dan alat tangkap yang meliputi perbaikan alat tangkap, kapal dan mesin, tempat penjemuran alat tangkap.
 - fasilitas suplai meliputi: suplai air dan BBM untuk kapal.
 - fasilitas penyimpanan, penanganan dan pengolahan hasil tangkapan meliputi: tempat penjualan, pembekuan, pengeringan, pabrik es, dan lainnya,
 - fasilitas komunikasi dan stasium cuaca.
 - fasilitas untuk awak kapal meliputi: penginapan, kamar mandi, poliklinik dan ruang pertemuan.
 - fasilitas pengelolaan meliputi: kantor dan pos keamanan.

F. Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Pengembangan suatu pelabuhan perikanan harus direncanakan sesuai dengan pola pengembangan yang telah ditentukan. Menurut Lubis (2012), pola pengembangan suatu pelabuhan perikanan adalah acuan awal mengembangkan suatu pelabuhan perikanan. Pola pengembangan pelabuhan perikanan diperlukan agar pembangunan dan operasionalnya sesuai dengan fungsi dan tujuan pengembangannya. Penyusunan pola pengembangan pelabuhan perikanan harus ada di dalam triptyque portuaire untuk pelabuhan perikanan, yakni keterkaitan antara aspek wilayah produksi (*foreland*), wilayah distribusi (*hinterland*) dan aspek pelabuhan perikanan (*fishing port*) agar fungsi dan tujuannya bisa dicapai.

Sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya maka pola pengembangan pelabuhan harus dilakukan dengan konsepsi "*multi-base system*" yakni suatu sistem

yang menyeluruh berdasarkan pengembangan wilayah yang dalam operasionalnya mencakup beberapa aspek produksi, pengolahan dan pemasaran hasil sampai pada aspek sosial ekonomi perikanan.

Sehubungan dengan hal itu maka pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan sebagai pengembangan komunitas perikanan (*fisheries community development*) secara terpadu yaitu:

- a. Pengembangan pelabuhan perikanan dengan segala sarana dan prasarana untuk meningkatkan usaha kegiatan perikanan (produksi, pengolahan, distribusi hasil perikanan), menunjang pertumbuhan industri-industri perikanan dan pada akhirnya menunjang pembangunan perikanan secara keseluruhan
- b. Pengembangan masyarakat perikanan dengan penyediaan fasilitas untuk kegiatan operasional dan pembangunan perkampung nelayan untuk rumah tangga nelayan.
- c. Pembinaan sumberdaya manusia perikanan melalui peningkatan ketrampilan dan profesionalisme dengan program-program pelatihan maupun manajemen secara terarah.

Pelabuhan perikanan sebagai salah satu infrastruktur perekonomian dinilai memiliki arti yang strategis terhadap perkembangan wilayah jika keberadaannya bernilai signifikan dalam pertumbuhan wilayah (Direktorat Jenderal Perikanan, 2000). Potensi pelabuhan perikanan pada suatu kawasan pusat pertumbuhan ditentukan oleh:

- e. Potensi sumberdaya alam, manusia dan buatan yang mendukung perkembangannya (*potensi supply*)
- f. Aspek lokasi (*locational rent*)
- g. Aksesibilitas ke pasar (potensi permintaan).

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2006, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya dapat berupa pelayanan sandar labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pelayanan bongkar muat, pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi ikan, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, pelaksana penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, pelaksanaan kesyahbandaran, pelaksanaan fungsi karantina ikan, publikasi hasil riset kelautan dan perikanan, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari dan pengendalian lingkungan.

Selanjutnya (Murdiyanto, 2004) menyatakan bahwa Pelabuhan perikanan berperan sebagai penghubung kegiatan di fishing ground/operasi penangkapan ikan di laut dengan kegiatan yang ada di hinterland berupa penanganan/pengolahan hasil tangkapan, dan pengangkutan produk ikan yang didaratkan.

Selanjutnya menurut Kusyanto (2005), untuk menjamin harga ikan dapat menguntungkan nelayan kewajiban Pemerintah membantu nelayan dalam memasarkan ikan melalui sistem lelang. Maksud dari sistem lelang adalah membantu nelayan menjual ikan untuk mendapatkan harga yang optimal pada suatu tempat tertentu kepada sejumlah pembeli melalui cara lelang. Dilain pihak fungsi pembinaan mutu dan pengolahan dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah produk perikanan sehingga akan menimbulkan dampak ganda baik terhadap pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai aktivitas dalam kegiatan perikanan bernilai untuk peningkatan kesejahteraan pekerja. Temuan ini sejalan bahwa aktivitas perikanan mampu menggerakkan perekonomian dan memenuhi kesejahteraan nelayan dan keluarganya (Rees *et all*, 2013).

Menurut Widiastuti, (2010) penilaian kinerja adalah sebuah Gambaran/ deskripsi sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dengan pekerjaan dari seseorang atau satu kelompok. Penilaian kinerja menjadi hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Penilaian kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik, yang merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi pustaka, hingga saat ini penelitian yang secara khusus mengkaji tentang tingkat pemanfaatan fasilitas dan strategi pengembangan dan pengelolaan pangkalan pendaratan Ikan (PPI) Ujung Lero belum pernah dilakukan, penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis, ada beberapa penelitian dan Jurnal yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan ini, antara lain:

1. Analisis Strategi Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasir Kabupaten Kebumen Ditinjau dari Sumberdaya Perikanan (Putri *et all.*, 2015).
2. Studi Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang, Nusa Tenggara Timur (Reni *et all.*, 2021).
3. Studi Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan dalam Rangka Peningkatan Produksi Di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Sumatera Utara (Yuspardianto, 2020).

4. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dasar dan Fungsional dalam Strategi Peningkatan Produksi Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah (Yahya *et all.*, 2013)
5. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Fasilitas Dasar dan Fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal (Nurdyana *et all.*, 2013).
6. *Implementation Strategy Eco Fishing Port at the Hamadi Fish Landing Base (FLB), Jayapura City, Papua Province* (Manalu *et all.*, 2022).
7. Rancangan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pelabuhanratu Terkait dengan Peningkatan Karakteristik Kelas Pelabuhan Perikanan Dan Pemilihan Jenis Kapal Penangkap Ikan (Iswadi *et all.*, 2016).
8. Tingkat Pemanfaatan dan Kepuasan Pengguna Fasilitas Rantai Dingin Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternat (Surahman *et all.*, 2022)
9. Analisis Tingkat Pemanfaatan Dan Kebutuhan Fasilitas Fungsional Dan Fasilitas Penunjang Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang (Prastyo, 2015)
10. Kondisi dan Analisis Kemungkinan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Firman *et all.*, 2017)